

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025

www.brida.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat khususnya bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. Cristina Shandra Tobondo, MT
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 serta Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun tersebut. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mencapai ***Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikannya dengan melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan Riset dan Inovasi sekaligus sebagai terobosan dalam rangka percepatan pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah terutama bagi kepentingan masyarakat dalam menata pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Kami pun menyadari bahwa keberhasilan riset dan inovasi yang dihasilkan masih kurang memuaskan semua pihak olehnya kami berharap dukungan pemikiran yang konstruktif serta dukungan dana yang memadai sehingga apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dapat tercapai.

Berdasarkan Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sesuai Renstra 2025–2029, capaian kinerja secara umum tergolong baik, meskipun belum seluruhnya memenuhi target.

Indikator **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** terealisasi 3,41 dari target 3,43 (99%), menunjukkan kinerja sangat tinggi dan hampir mencapai target. Sementara itu, **Indeks Inovasi Daerah (IID)** terealisasi 57,12 dari target 75 (76%), sehingga masih perlu upaya peningkatan agar target Renstra dapat tercapai.

Dalam hal persentase realisasi anggaran untuk mencapai sasaran adalah **Baik**, dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.168.989.866 dengan realisasi sebesar Rp.10,308,683,090 (85%) deviasi terbesar yakni dari silpa belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN).

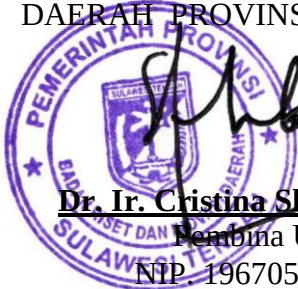
Pada indikator IDSD ada beberapa pilar yang menjadi faktor penghambat target yang ditentukan seperti, Pilar 11 (Penurunan 0,37 poin), Pilar 4 – Volatilitas Makroekonomi dan Ruang Fiskal (4,07 ke 3,71) dan Pilar 6 – Keterampilan Digital (turun 0,25 poin). Dan pada indikator IID yaitu, pada Satuan Inovasi Daerah (SID) skor kematangan inovasi masih rendah karena indikator replikasi belum terpenuhi, inovasi di sistem IGA belum tercantum spesifik dalam DPA/RKA, serta kualitas video inovasi belum memenuhi 5 substansi yang dipersyaratkan dan pada Satuan Perangkat Daerah (SPD) terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu penurunan NIB dan belum ditetapkannya SID/RIPJPID.

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pada IDSD melakukan Integrasi IMDI, Optimalisasi peran BRIDA, Modernisasi SPAM dan Pemanfaatan Kalkulator IDSD. Dan pada IID yaitu, BRIDA Provinsi memfasilitasi MOU replikasi inovasi dengan kab/kota (Sigi, Palu, Donggala, Poso, Touna, Morut), OPD telah diarahkan mencantumkan anggaran pembinaan inovasi dalam RKA, telah dilakukan pembinaan pembuatan video inovasi sesuai 5 substansi wajib dan terbit Surat Gubernur yang mewajibkan pejabat eselon II dan III berinovasi.

Kiranya penyajian Laporan Kinerja (LKj) Badan Riset dan Inovasi Daerah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. Cristina Shandra Tobondo, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1.3 Isu-isu Strategis / Permasalahan	16
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra Perangkat Daerah	21
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	28
2.3 Indikator Kinerja Utama	32
2.4 Perjanjian Kinerja	38
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	41
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	42
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	43
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	47

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	50
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	57
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	58
3.2 Realisasi Anggaran	70
3.3 Inovasi	73
3.4 Penghargaan	74
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia ASN BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah s.d Tahun 2026	3
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.....	6
Tabel 1.3 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	20
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	27
Tabel 2.3 Program Anggaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	28
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	33
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	36
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	39
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	42
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	43
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja BRIDA	44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	47
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi Lain	48
Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
Tabel 3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	59
Tabel 3.8 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	61
Tabel 3.9 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.....	62
Tabel 3.10 Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	63
Tabel 3.11 Output Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	64
Tabel 3.12 Output Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	65
Tabel 3.13 Output Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66
Tabel 3.14 Output Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD.....	67
Tabel 3.15 Output Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68
Tabel 3.16 Output Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.....	69
Tabel 3.17 Output Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	70

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Bagan Struktur Organisasi BRIDA	15
Diagram 2.1 Cascading BRIDA Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	22
Diagram 2.1 Cascading BRIDA Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	24

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Orientasi Layanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yaitu Urusan Penelitian dan pengembangan dilandasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a) Pasal 219 menyebutkan bahwa “Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penelitian dan pengembangan”
 - b) Pasal 386 menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan :
 - a) pasal 4 menyatakan bahwa “Inovasi Daerah Berbentuk” :
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - b) pasal 32 menyatakan :
 - 1) ayat (1) : “Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah”
 - 2) ayat (2) : Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional :
- a) pasal 3 menyebutkan : “Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yg terintegrasi di daerah “.
 - b) pasal 66 menyatakan bahwa: “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c) pasal 67 menyatakan bahwa: ”BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila”
 - d) pasal 68 menyatakan bahwa : “Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) :
 - 1) pelaksanaan Kebijakan, Fasilitas dan pembinaan;
 - 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem Iptek di daerah;
 - 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis LITBANGJIRAP IPTEK;
 - 7) Koordinasi sistem IPTEK daerah.

Mencermati akan beberapa ketentuan di atas, maka orientasi pelayanan BRIDA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi:

peran awal → input penyusunan kebijakan berbasis kelitbangan
 peran antara → katalisator pencapaian target sasaran pembangunan
 peran akhir → monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia ASN BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah s.d Tahun 2025

No	U R A I A N	Jumlah ASN Berdasarkan				Jumlah
		Jabatan	Gol	Tkt Pendidikan	Dilat Struktural	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)					51 org
1.	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf / Pelaksana					
	Pejabat Struktural :					8 org
	Kepala Badan (Eselon II/a)	1 org				1 org
	Sekretaris (Eselon III/a)	1 org				1 org
	Kepala Bidang (Eselon III/a)	4 org				4 org
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	2 org				2 org
	Pejabat Fungsional :					11 org
	Perencana (Ahli Muda)	1 org				1 org
	Analisis Pemanfaatan Iptek (Ahli Muda)	7 org				7 org
	Peneliti (Pertama)	3 org				3 org
	Staf / Pelaksana	15 org				32 org
	Penelaah Teknis Kebijakan	3 org				15 org
	Pengelola Data dan Informasi	12 org				3 org
	Pengadministrasi Perkantoran	2 org				12 org
	Operator Layanan Operasional					2 org
2.	Golongan					49 org
	Golongan IV		10 org			10 org
	Golongan III		28 org			28 org
			11 org			11 org

	Golongan II Golongan I					
3.	Tingkat Pendidikan					49 org
	Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA D3			- 15 org 17 org 14 org 3 org		- 15 org 17 org 14 org 3 org
4.	Diklat Struktural					
	Lemhanas Spamen / Diklat PIM II Spama / Diklat PIM III ADUM / Diklat PIM IV				- - 4 org 6 org	
II.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)					
1.	Staf					26 org
2.	- Golongan X - Golongan IX - Golongan VII - Golongan V - Golongan III - Golongan I		3 org 20 org - 3 org			3 org 20 org - 3 org
II.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)					26 org
3.	- Doktor (S3) - Pasca Sarjana (S2) - Sarjana (S1) - SLTA - SMP - SD			- 3 org 20 org 3 org		- 3 org 20 org 3 org
III.	Non ASN					25 org
	- Pasca Sarjana (S2) - Sarjana (S1) - SLTA - SMP - SD			- 10 org 15 org		- 10 org 15 org
	Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Non ASN pada Badan Riset dan Inovasi Daerah					

Sumber : Subbag Kepeg & Umum BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

b. Sumber Daya Aset Sarana dan Prasarana

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang pula dengan sarana dan prasarana meliputi bangunan gedung kantor, gedung laboratorium, green house, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi.

Sarana transportasi saat ini tersedia 7 unit roda empat dengan kondisi baik. Adapun untuk roda dua yang tersedia dirasa masih kurang, sehingga dibutuhkan penambahan unit yang direncanakan secara bertahap mulai sejak tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun 2029.

Peralatan computer telah didukung dengan keberadaan *Wireless Fidelity (WIFI)* dan akses internet yang memadai.

Saat ini pun, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah juga telah memiliki website (www.brida.sultengprov.go.id) dan *E-Jurnal Bomba/Jurnal Pembangunan Daerah* (<https://jurnalbrida.sultengprov.go.id>) guna menunjang publikasi dan diseminasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

Selain itu, guna menunjang peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah telah mengembangkan suatu aplikasi berbasis *website* guna mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerjanya yaitu <https://siakip-brida.com/>

Dalam rangka mendorong implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG), BRIDA telah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah gender antara lain ruang laktasi, toilet yang ramah bagi perempuan dan penyandang disabilitas serta fasilitas pendukung bagi ibu yang bekerja.

Daftar inventaris sarana dan prasarana BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sarana Prasarana	Unit	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor	4.260 M2	KIB A
2.	Bangunan (Gedung)	10 unit	KIB B
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit	KIB B
4.	Kendaraan Dinas Roda 2 dan 3	23 unit	KIB C
5.	Barang Lainnya	-	KIB D

Sumber : Subbag Keuangan & Aset BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Adapun fungsinya adalah :

- Perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan riset dan inovasi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan empat Bidang yaitu :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu:

- a. **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Sub bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
 2. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
 4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 5. Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 6. Mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 8. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 10. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset.

- b. **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan surat menyurat. Subbag Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum; Melaksanakan pengelolaan dan analisa jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara dan tatalaksana organisasi;
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

2. BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH

Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi;
- f. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

3. BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitasi manajemen kekayaan intelektual;
- f. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitasi alih teknologi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi perusahaan pemula berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Pelaksanaan Kemitraan Global dan Kemitraan Industri;

- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
- j. Pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
- k. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi daerah;
- m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- n. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset Dan Inovasi Daerah.

4. BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR RISET DAERAH

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, pengelolaan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi serta infrastruktur riset dan inovasi;
- c. Pelaksanaan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi program, anggaran dan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan di bidang SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta serta pengendalian SDM ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Pelaksanaan optimalisasi bimbingan teknis supervisi dan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah meliputi pengembangan sains dan teknologi, kawasan ekonomi, kawasan industri dan kawasan pariwisata;

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah.

5. BIDANG RISET, INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH

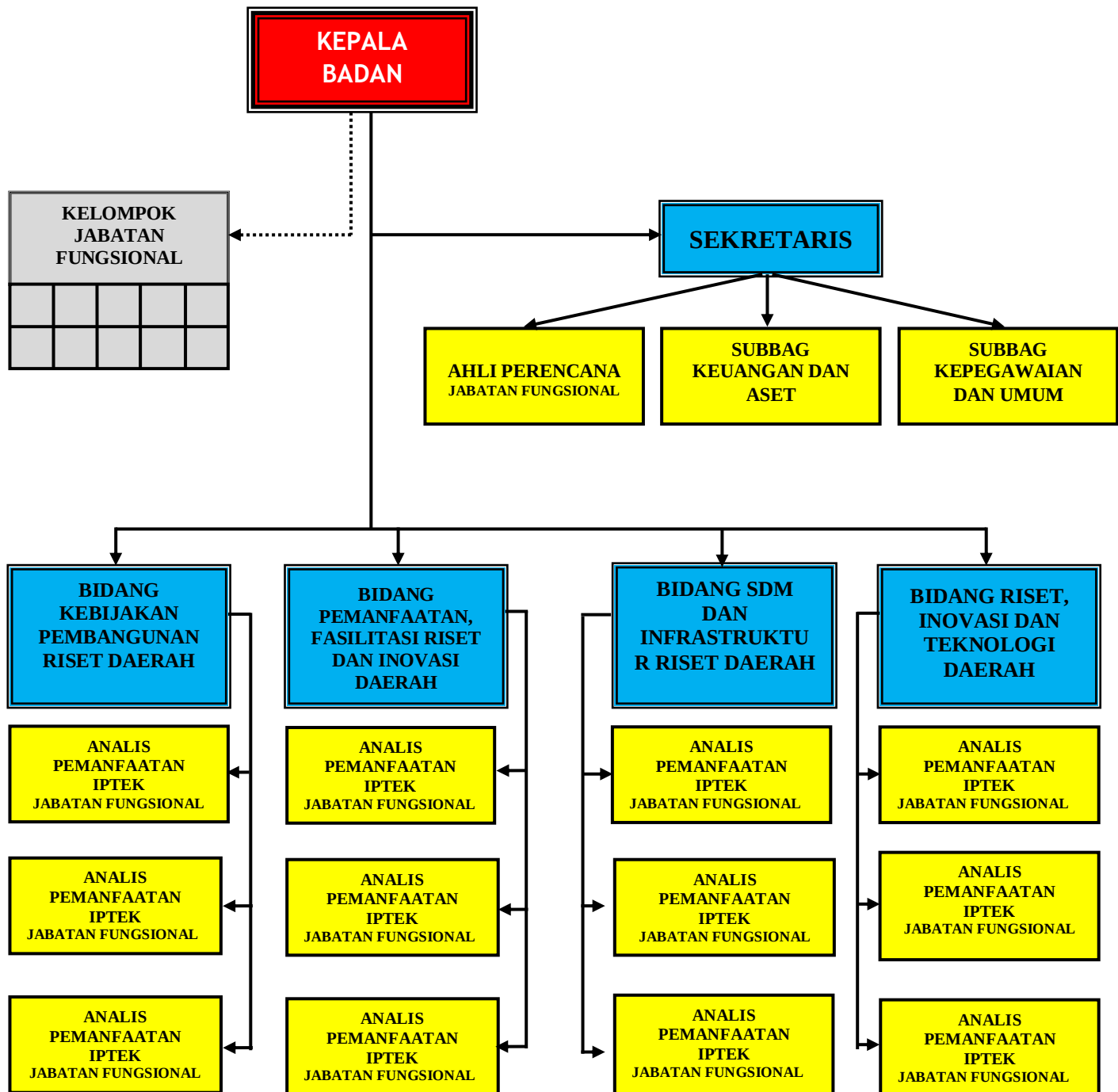
Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah. Bidang Riset, Inovasi Dan Teknologi Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil keRisetan;
- j. elaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

Diagram 1.2
Bagan Struktur Organisasi
Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



1.3. Isu - isu Strategis / Permasalahan

Isu - isu strategis yang aktual dan problematik serta perlu segera ditangani antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi Iptek terhadap masyarakat, pasar dan bisnis masih sangat rendah sehingga belum mampu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat

Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terhadap masyarakat, pasar, dan dunia usaha hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar. Sebagian besar hasil penelitian belum terhilirisasi secara optimal dan belum terintegrasi dengan kebutuhan sektor bisnis, sehingga dampak Iptek terhadap peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan Iptek belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat adopsi teknologi, lemahnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, serta belum kuatnya ekosistem inovasi menjadi faktor utama yang menghambat peran strategis Iptek sebagai pengungkit pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Terbatasnya sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal

Ketersediaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) hingga saat ini masih terbatas, baik dari sisi pendanaan, jumlah maupun kualitas peneliti dan perekayasa. Keterbatasan anggaran riset dan inovasi berdampak pada minimnya kegiatan penelitian yang berkelanjutan serta terbatasnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia Iptek. Kondisi ini menyebabkan kemampuan lembaga penelitian dan inovasi dalam menghasilkan riset yang aplikatif dan berdaya saing

masih belum optimal. Selain itu, tingkat produktivitas Iptek yang tercermin dari jumlah paten, hak kekayaan intelektual, serta publikasi ilmiah juga masih relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa output riset belum sepenuhnya mampu menghasilkan inovasi bernilai tambah tinggi maupun kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi, daya saing ekonomi, dan pemecahan permasalahan pembangunan.

3. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi

Pada era globalisasi saat ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi - inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya inovasi akan berkorelasi positif dalam hal peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, inovasi harus terus diciptakan dan dilahirkan karena zaman semakin cepat berubah. Sementara Inovasi di Sulawesi Tengah belum berkembang oleh karena itu maka perlu penanganan yang serius untuk meningkatkan peran BRIDA di Sulawesi Tengah, sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah **One Agency, One Innovation**.

1.4. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

Perencanaan Kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja dengan bobot 30,00% dari 100% Komponen Perencanaan kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen Perencanaan Kinerja, dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan cascading disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain, crosscutting, Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan Kinerja

mendapatkan nilai 28,20 (94,00% dari bobot 30,00%). Masih ditemui kelemahan dalam perencanaan kinerja yaitu: Terdapat ketidakselasan antara perencanaan Renstra dengan Perjanjian Kinerja, baik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja, serta Target sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja (Lakip)

Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00% dari total 100%. Komponen pengukuran kinerja yang dievaluasi meliputi Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 26,70 (89,00% dari bobot 30,00%), masih ada kelemahan yang dijumpai yaitu: pengukuran kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).

Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00% dari total 100%. Komponen Pelaporan Kinerja yang dievaluasi meliputi komponen pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 15,00 (100% dari bobot 15,00%). Tidak ditemukan kelemahan dalam pelaporan kinerja.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot penilaian 25,00% dari total 100% komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas internal Badan.

Dari Hasil evaluasi tersebut, direkomendasikan kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan perbaikan atas Akuntabilitas kinerjanya sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2030 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah (Inmendagri No. 2 Tahun 2025)
2. Mengusulkan ke Pemprov Sulteng untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran Kinerja lingkup Pemprov Sulteng
3. Membuat aplikasi guna memudahkan pelaksanaan pengukuran dan monev kinerja secara internal.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Tabel 1.3

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP BRIDA TAHUN 2024							
No .	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan		Rekomendasi		Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	700.1.2.1/029/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal 30 April 2025	1 .	Menyelaraskan dokumen perencanaan Renstra dengan Perjanjian Kinerja baik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target sehingga terjadi kesesuaian antara dokumen perencanaan.	1 .	Menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2030 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah (Inmendagri No.2 Tahun 2025)	Telah dibuat Renstra Tahun 2025-2030.	https://siakip-brid.com/
		2 .	Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi agar membuat dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk melakukan pengukuran Kinerja.	2 .	Mengusulkan ke Pemprov Sulteng untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam Pengukuran Kinerja lingkup Pemprov Sulteng.	Dalam Proses Rekomendasi.	
		3 .	Membuat dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal.	3 .	Membuat aplikasi guna memudahkan pelaksanaan pengukuran dan monev kinerja secara internal.	Telah Tersedia Aplikasi SIAKIP BRIDA.	

**BAB
II**
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

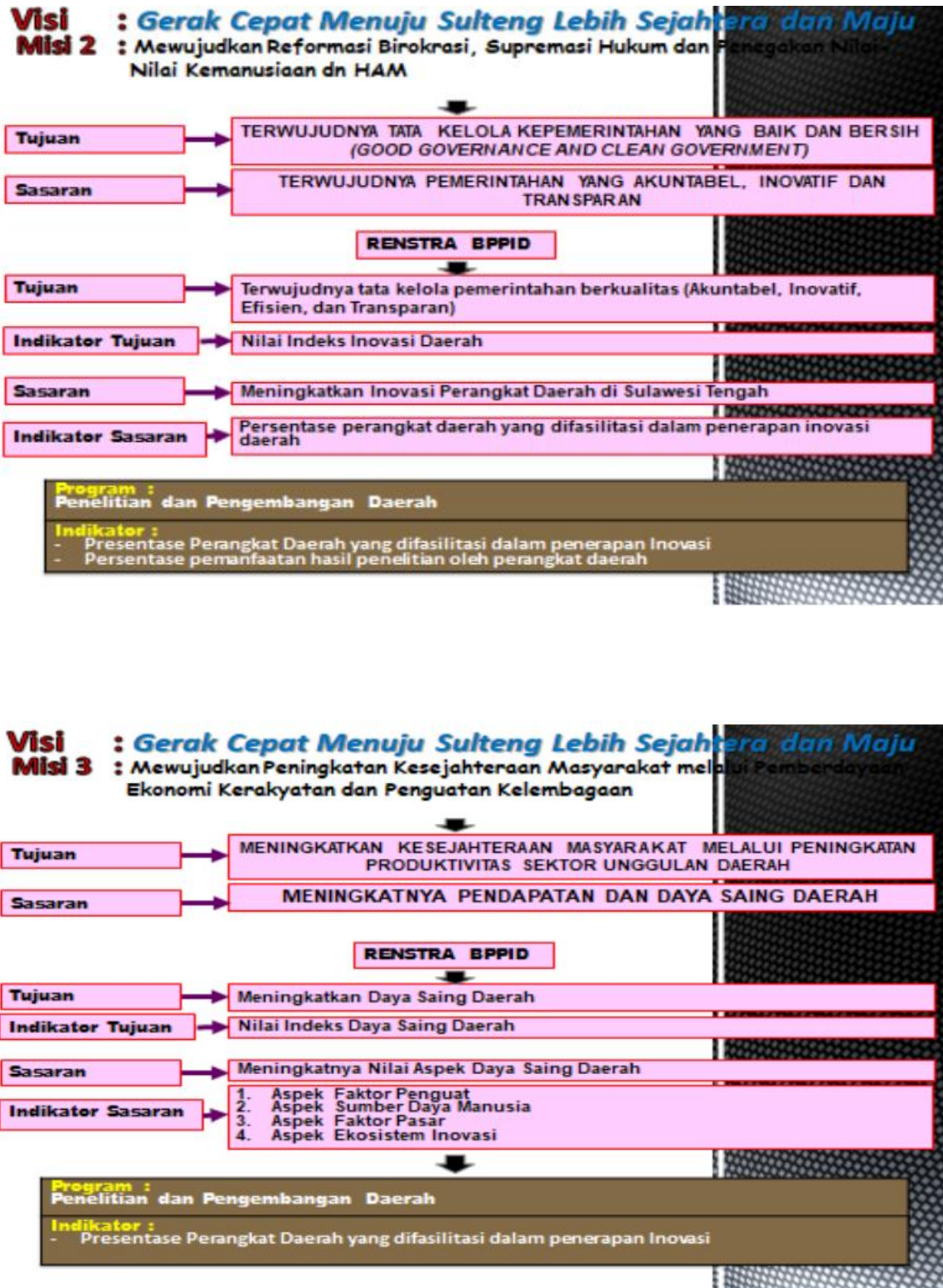
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

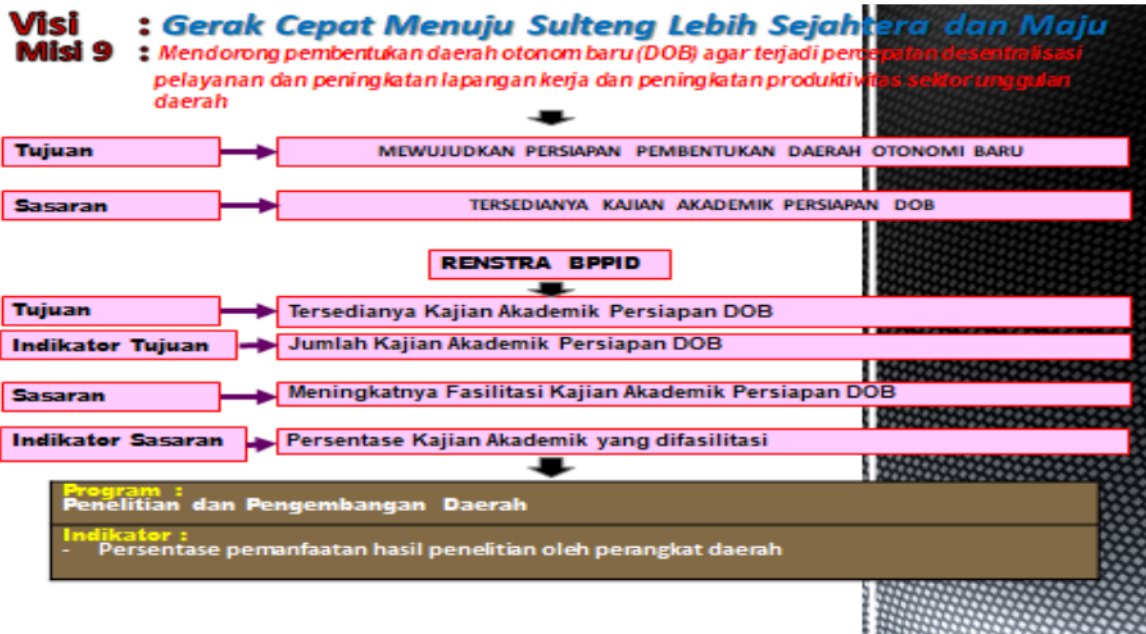
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2.1.1. Renstra Tahun 2022 – 2026

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BRIDA menyusun perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dibawah ini :

Diagram 2.1
Cascading Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026





Tabel 2.1.

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan).	1. Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2.71	2.92	3.05	3.25	3.50
	2. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan Provinsi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	53.55	55.77	57.98	59.77	62.00

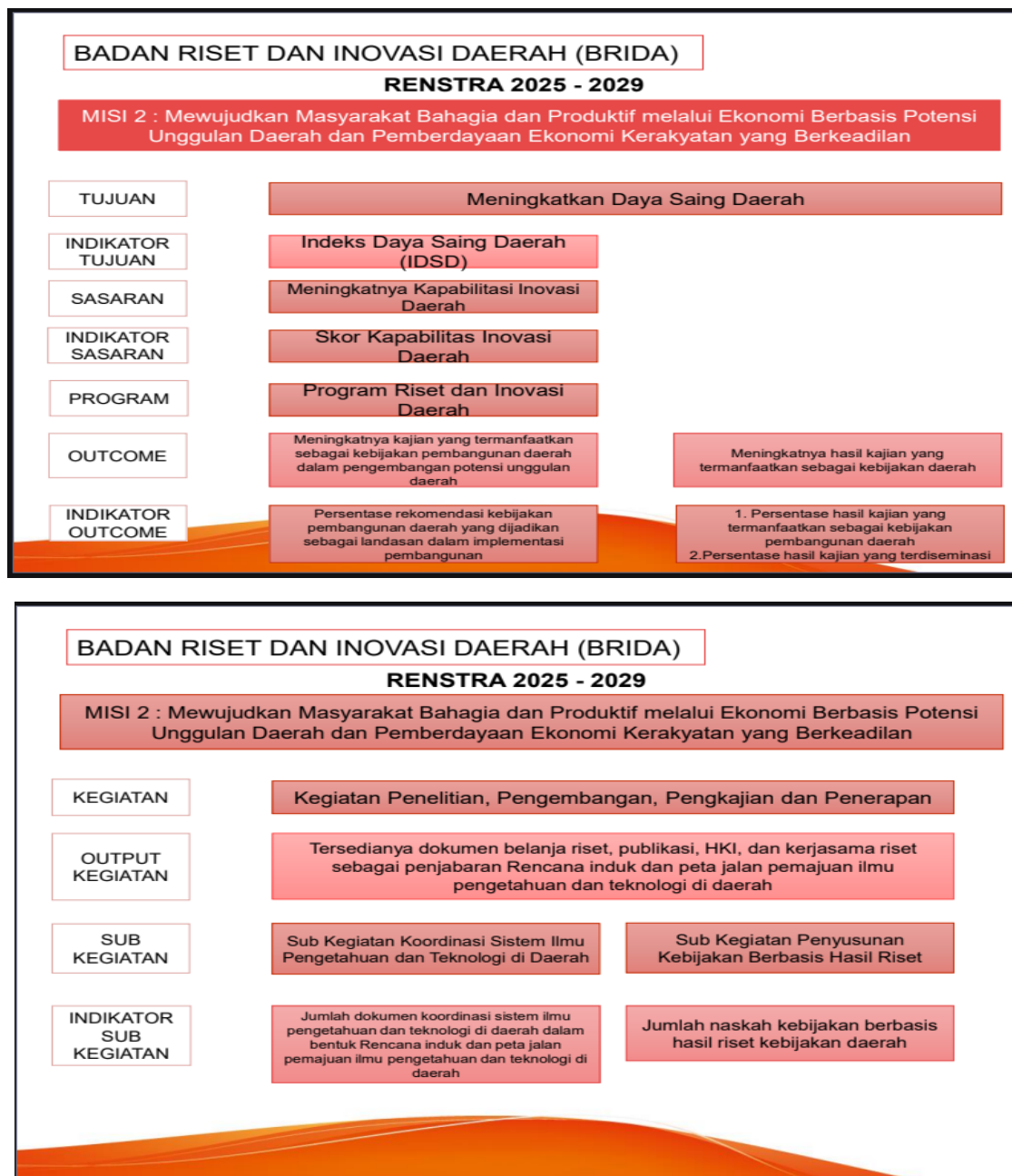
Dari tujuan dan indikatornya maka strategi untuk mencapai sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerapan Inovasi Daerah
2. Meningkatkan Implementase Rencana Kelitbangan
3. Peningkatan Hasil Kelitbangan
4. Peningkatan Kebijakan Inovasi.

2.1.2. Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BRIDA menyusun perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Berikut kami sajikan hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dibawah ini :

Diagram 2.2
Cascading Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)**RENSTRA 2025 - 2029**

MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

KEGIATAN	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
OUTPUT KEGIATAN	Tersedianya dokumen peningkatan fasilitasi inovasi, inovasi daerah dan Pembinaan / Penguatan Indeks Daya Saing Daerah	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)**RENSTRA 2025 - 2029**

MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

KEGIATAN	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
OUTPUT KEGIATAN	Tersedianya dokumen peningkatan fasilitasi pemanfaatan dan diseminasi hasil kajian	
SUB KEGIATAN	1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 2. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	3. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 4. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
INDIKATOR SUB KEGIATAN	1. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 2. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	3. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) 4. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)

RENSTRA 2025 - 2029

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal

TUJUAN	Meningkatkan Inovasi Daerah	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Inovasi Daerah (IID)	
SASARAN	Meningkatnya Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	Meningkatnya Satuan Inovasi Daerah (SID)
INDIKATOR SASARAN	Skor SPD	Skor SID
PROGRAM	Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
OUTCOME	1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
INDIKATOR OUTCOME	1. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan 2. Persentase Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SDM dan infrastruktur	Indeks RB Perangkat Daerah

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)

RENSTRA 2025 - 2029

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal

KEGIATAN	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
OUTPUT KEGIATAN	Pemenuhan laporan peningkatan pemanfaatan inovasi dan pemenuhan
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan



Tabel 2.2.

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya Daya Saing Daerah dan produktivitas Ekonomi Sektoral.	1. Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.43	3.53	3.63	3.72	3.82
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	2. Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00

Dari tujuan dan indikatornya maka strategi untuk mencapai sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi kebijakan pembangunan berdasarkan belanja riset, publikasi, HKI, dan kerjasama riset
2. Meningkatnya hasil kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan daerah
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan
4. Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.

2.2. Struktur Program dan Kegiatan

Berdasarkan indikator kinerja BRIDA yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat bernilai strategis untuk peningkatan kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Sulawesi Tengah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Anggaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Angaran Sebelum Perubahan	Angaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.286.238.891	Rp. 10.988.556.415	(-) Rp. 1.297.682.476
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 233.660.000	Rp. 225.547.000	(+) Rp. 8.113.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.580.642.304	Rp. 8.609.580.723	(-) Rp. 971.061.581

3.	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 4.437.550	Rp. 4.437.550	-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 41.010.000	Rp. 68.750.000	(+) Rp. 27.740.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.190.647.179	Rp. 655.586.179	(-) Rp. 535.061.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 267.554.358	Rp. 420.533.200	(+) Rp. 152.978.842
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 292.232.500	Rp. 298.316.763	(+) Rp. 6.084.263
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 676.055.000	Rp. 705.805.000	(+) Rp. 29.750.000
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.684.632.400	Rp. 1.600.966.650	(-) Rp. 83.665.750
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 325.000.000	Rp. 368.748.850	(+) Rp. 43.748.850
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 324.999.700	Rp. 141.939.600	(-) Rp. 183.060.100

3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Rp. 324.999.950	Rp. 146.408.650	(-) Rp. 178.591.300
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 709.632.750	Rp. 943.869.550	(+) Rp. 234.236.800

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan setiap program tersebut sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - OPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Sosialisasi Perundang – Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

1. Penelitian dan Pengembangan Aspek - Aspek Sosial
2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif

2.3. Indikator Kinerja Utama

2.3.1. IKU Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan pada BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pada dokumen RPJMD 2021-2026.

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, indikator kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mendukung dalam pencapaian Misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM kemudian Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Sumber Data / Interpretasi	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	$Skori_{d,d} = (Ni_{d,d} - NRiNTi - NRi) \times 5$	Skori _d adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Ni _d adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NRi adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NTi adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95)	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) / Semakin tinggi nilai IDSD Pemerintah Daerah, maka semakin Meningkat Kualitas Indeks daya saing daerah	Bidang Kebijakan dan Pembangunan Riset Daerah, Bidang SDM dan Infrastruktur Riset

2	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan Provinsi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$	Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 1) 3 Variabel; 2) 15 Indikator; dan 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:	BSKDN Kementerian Dalam Negeri / Semakin tinggi nilai IID Pemerintah Daerah, maka semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan kepada masyarakat	Bidang Riset Teknologi dan Inovasi, Bidang Pemanfaatan dan Fasilitas Riset
---	--	-----------------------------	---	--	--	--

				1) 5 Variabel; 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%)		
--	--	--	--	--	--	--

2.3.2. IKU Tahun 2025 -2029

Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan pada BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pada dokumen RPJMD 2025-2029.

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, indikator kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mendukung dalam pencapaian Misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan kemudian Misi 4 (empat) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Sumber Data / Interpretasi	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	$Skori_{d,d} = (Ni_{d,d} - NRiNTi - NRI) \times 5$	Skori _{d,d} adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Ni _{d,d} adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NRi adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NTi adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95)	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) / Semakin tinggi nilai IDSD Pemerintah Daerah, maka semakin Meningkat Kualitas Indeks daya saing daerah	Bidang Kebijakan dan Pembangunan Riset Daerah, Bidang SDM dan Infrastruktur Riset

2	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan Provinsi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$	Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 4) 3 Variabel; 5) 15 Indikator; dan 6) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:	BSKDN Kementerian Dalam Negeri / Semakin tinggi nilai IID Pemerintah Daerah, maka semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan kepada masyarakat	Bidang Riset Teknologi dan Inovasi, Bidang Pemanfaatan dan Fasilitas Riset
---	--	-----------------------------	---	--	--	--

				3) 5 Variabel; 4) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%)		
--	--	--	--	--	--	--

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi Amanah (Gubernur Sulawesi Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Adapun tujuan dalam menyusun Penjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan perubahan yang dinamis dan realistis

Adapun Perjanjian Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			RENSTRA 2021-2026	RENSTRA 2025-2029
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,27	3,43
2	Meningkatnya inovasi dan hasil daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	50	75

BAB**III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini peran instansi publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi partisipatoris aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik.

Akuntabilitas tidak hanya sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, namun akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang amanah, perlu dikembangkan system monitoring kinerja entitas pelayanan publik. Melalui sistem ini, kemajuan prestasi atau kinerja terhadap pencapaian visi/ misi yang telah ditetapkan dapat diketahui dalam tahap pelaksanaan program (on going program).

Dengan demikian, permasalahan dan kendala pembangunan dapat segera diidentifikasi dan solusi terbaik dapat segera diformulasikan. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa indikator kinerja tidak terlepas dari mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output) dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 meliputi aspek Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta Analisis dan Evaluasi Kinerja.

3.1 Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja/kegiatan nyata (realistis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan untuk masing-masing kelompok indikator. Masing masing indikator tersebut mencakup indikator kinerja antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun anggaran 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah ditetapkan rencana kinerja dari 2 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Akuntabilitas kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 dijabarkan pada tabel 3.1 dan table 3.2.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2025-2029	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,43	3,41	99%
Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	75	57,12	76%

Berdasarkan Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Daya Saing Daerah**, indikator **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** memiliki target sebesar **3,43** dengan realisasi **3,41** atau mencapai **99%**, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan daya saing daerah telah berjalan dengan cukup optimal.

Sementara itu, pada sasaran strategis **Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah**, indikator **Indeks Inovasi Daerah (IID)** ditargetkan sebesar **75**, dengan realisasi **57,12** atau capaian **76%**. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan inovasi daerah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan ekosistem inovasi, peningkatan kolaborasi riset, serta optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mendekati target, namun masih diperlukan upaya peningkatan terutama pada aspek inovasi daerah agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara optimal.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Membanding capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi perbaikan/upaya yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja sebelumnya untuk menghasilkan tren capaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja.

BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 2 (dua) indikator sasaran strategis. Setelah membandingkan capaian indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) semua realisasinya tercapai dan mengalami kenaikan di tiap tahunnya.

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023, 2024 dan 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,92	3,25	111%	3,27	3,30	101%	3,43	3,41	99%
Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	43,77	34,00	78%	35,01	55,22	157%	75	57,12	76%

Berdasarkan Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023–2025, terlihat konsistensi yang kuat pada peningkatan daya saing daerah, sementara pada aspek inovasi dan hasil riset masih memerlukan penguatan strategi yang lebih berkelanjutan agar peningkatan nilai realisasi dapat sejalan dengan peningkatan target.

Pada indikator **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**, capaian menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif. Tahun 2023 realisasi mencapai **3,25** (111%), melampaui target **2,92**. Tahun 2024 kembali melampaui target dengan realisasi **3,30** (101%) dari target **3,27**. Sementara pada tahun 2025, realisasi sebesar **3,41** dari target **3,43** (99%) menunjukkan capaian yang sangat mendekati target meskipun sedikit di bawah. Secara keseluruhan, kinerja pada aspek daya saing daerah tergolong konsisten dan berada pada kategori sangat baik.

Adapun indikator **Indeks Inovasi Daerah (IID)**, capaian menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2023 realisasi sebesar **34,00** (78%) masih di bawah target. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan capaian menjadi **55,22** (157%) yang melampaui target **35,01** secara signifikan. Pada tahun 2025, meskipun nilai realisasi meningkat menjadi **57,12**, persentase capaian turun menjadi 76% karena target yang ditetapkan jauh lebih tinggi (75).

Metodologi IDSD 2025 merujuk pada metodologi Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dikontekstualisasikan dengan dinamika daya saing di Indonesia. Untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat dari beberapa pilar terkait indikator yang akan diukur sebagai berikut:

No.	Indikator	Aspek Penilaian
1.	Lingkungan Pendukung	Pilar Institusi Pilar Infrastruktur Pilar Adopsi TIK Pilar Stabilitas Ekonomi Makro
2.	Sumber Daya Manusia	Pilar Kesehatan Pilar Keterampilan
3.	Pasar	Pilar Pasar Produk Pilar Tenaga Kerja Pilar Sistem Keuangan Pilar Ukuran Pasar
4.	Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis Pilar Kapasitas Inovasi

Aspek penilaian di atas, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mengemban Indikator ekosistem inovasi dengan aspek penilaian Pilar Kapasitas Inovasi, Adapun indikator dan aspek penilaian yang lainnya masing-masing Lembaga/Institusi/Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pilar tersebut.

Pada tahun 2023 nilai IDSD provinsi Sulawesi Tengah agak sedikit menjauh dari nilai IDSD Nasional meskipun targetnya tercapai dan masih ada beberapa Kabupaten yang tidak ada nilai seperti Kabupaten Banggai Laut dan Donggala. Hal tersebut dikarenakan salah satu aspek penilaian Pilar 1 Kelembagaan dan Pilar 9 Ukuran Pasar yang belum dipenuhi dua kabupaten tersebut dan ada beberapa pilar yang mengalami penurunan.

Sementara di tahun 2024 mengalami peningkatan skor IDSD Sulawesi Tengah yang dikonfirmasi adanya pergerakan positif pada pilar fundamental. Namun, evolusi metodologi yang melibatkan 64 indikator mendalam telah menyingkap kerentanan pada pilar-pilar pasar dan infrastruktur utilitas. Struktur internal BRIDA Sulteng harus memperkuat koordinasi lintas OPD menggunakan rincian indikator ini sebagai dasar target kinerja.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang bertujuan untuk menggunakan data informasi IDSD dalam bentuk program dan kegiatan serta dapat memahami data-data yang diperlukan untuk bahan pengukuran IDSD. Dengan harapan semoga pada tahun 2025 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah tetap sesuai dengan realisasi yang diharapkan dan akhirnya target dapat dicapai.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Pada tahun 2025 nilai indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) mengalami kenaikan dari tahun 2025 yang hanya berkisar pada *55,22 / Inovatif*, menjadi *57,12 / Inovatif*, yang menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan **Kenaikan Indeks Inovasi Daerah kategori Provinsi** dari **Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**.

Begitu juga dengan pengelolaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mendapatkan penghargaan Pengelolaan Indeks Daya Saing Terbaik Tahun 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nilai dari Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 telah dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan penghargaan-penghargaan tersebut sebagai pemicu peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Apabila dilihat dalam capaian realisasi kinerja pada tahun 2025, baik indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan mengalami kenaikan indeks inovasi daerah kategori provinsi.

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,41	3,82	89%
Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	57,12	77	74%

Berdasarkan capaian kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat kemajuan menuju target akhir Renstra 2025–2029 menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan.

Pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Daerah, realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar **3,41** dari target akhir **3,82** atau mencapai **89%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sudah mendekati target jangka menengah dan berada pada jalur yang positif.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatkan Inovasi dan Hasil Riset Daerah, realisasi Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar **57,12** dari target akhir **77** atau mencapai **74%**. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang cukup, namun masih membutuhkan penguatan dan akselerasi agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Analisis perbandingan dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (benchmark kinerja), dari 2 indikator kinerja strategis yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdapat indikator kinerja yang parameternya diambil atau terkait erat dengan ukuran nasional yang dirujuk secara nasional sekaligus penilaiannya diukur oleh lembaga tertentu.

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi Lain

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL/PROVINSI LAIN	LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,41	3,50 (*)	- 0,09
Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	57,12	62,35 (*)	- 5,23

Ket. (*) = Nilai IDSD Nasional, Nilai IID Prov. Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025 TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025			
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025			
A. Kategori Provinsi			
Rekapitulasi:			
1) Sangat Inovatif : 8 Provinsi			
2) Inovatif : 23 Provinsi			
3) Kurang Inovatif : 7 Provinsi			
4) Tidak Dapat Dinilai (<i>Disclaimer</i>) : 0 Provinsi			
No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2.	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3.	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4.	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5.	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6.	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7.	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,25	Sangat Inovatif
9.	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10.	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif
11.	Provinsi Banten	63,35	Inovatif
12.	Provinsi Sulawesi Selatan	62,35	Inovatif
13.	Provinsi Aceh	62,23	Inovatif
14.	Provinsi Kalimantan Timur	59,90	Inovatif
15.	Provinsi Jambi	59,75	Inovatif
16.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59,70	Inovatif
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara	58,16	Inovatif
18.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	57,85	Inovatif
19.	Provinsi Sulawesi Tengah	57,12	Inovatif
20.	Provinsi Gorontalo	55,01	Inovatif
21.	Provinsi Lampung	52,89	Inovatif

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) jika dibandingkan dengan yang tertinggi seluruh Indonesia maka Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ke 19 (sembilan belas) secara Nasional. Kemudian dalam lingkup wilayah pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ke 3 (tiga) dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dengan selisih nilai **-5,23** dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan selisih nilai **-1,04**. Walaupun jika dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lain di Pulau Jawa dan Sumatera yang memperoleh nilai yang sudah masuk kategori Sangat Inovatif. Hasil ini dapat menjadi pemicu agar Provinsi Sulawesi Tengah bisa

lebih meningkatkan lagi beberapa aspek variabel dalam indikator penilaian tersebut, terutama pada variabel-variabel yang masih dianggap rendah oleh penilai dalam hal ini BSKDN Kemendagri RI.

Dan juga harus selalu ditunjang dengan pelaksanaan Fasilitasi serta Pendampingan pengelolaan Indeks Inovasi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, serta memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi agar dapat berkompetisi dalam inovasi sebagai salah satu syarat pemenuhan data penilaian Innovative Government Award (IGA).

PROVINSI SULAWESI TENGAH



3,41
SKOR IDSD 2025
PROVINSI
SULAWESI TENGAH



8
kab/kota
≥ skor provinsi

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROV. SULAWESI TENGAH	4,44	3,05	3,40	3,71	3,70	4,00	2,58	3,05	2,36	4,70	2,34	3,54	3,41
RATA-RATA KAB/KOTA	4,43	2,81	3,86	3,77	3,65	4,28	4,30	3,18	2,14	4,06	3,06	2,00	3,46
BANGGAI KEPULAUAN	4,73	2,54	3,22	3,50	3,51	4,38	5,00	3,41	2,19	3,58	3,42	1,46	3,41
BANGGAI	4,54	3,15	3,79	3,46	3,84	4,23	3,65	3,79	1,94	4,44	2,96	3,26	3,59
MOROWALI	4,30	2,46	3,90	3,27	3,70	4,22	0,50	2,97	2,22	5,00	2,92	2,32	3,15
POSO	4,55	2,94	4,01	4,10	3,86	4,40	5,00	3,14	2,75	3,96	2,67	2,63	3,67
DONGGALA	4,48	3,12	3,81	3,83	3,58	4,17	4,97	2,93	2,68	4,09	2,99	1,27	3,49
TOLI TOLI	4,22	2,64	4,17	3,92	3,50	4,20	5,00	4,09	2,21	3,91	4,41	2,41	3,72
BUOL	4,66	2,15	3,66	3,98	3,75	4,27	4,86	3,46	2,19	3,75	2,96	1,53	3,43
PARIGI MOUTONG	4,64	3,22	3,96	4,20	3,31	4,26	5,00	2,53	2,00	4,22	2,51	1,81	3,47
TOJO UNA UNA	4,55	2,59	3,55	3,70	3,47	4,19	5,00	2,78	1,69	3,73	2,83	1,03	3,26
SIGI	4,54	2,77	4,02	4,11	3,79	4,34	5,00	2,82	1,26	3,95	2,42	1,75	3,40
BANGGAI LAUT	4,37	2,74	3,49	3,31	3,44	4,33	5,00	2,77	1,53	3,36	3,23	0,68	3,19
MOROWALI UTARA	3,80	2,55	3,79	3,18	3,76	4,33	1,95	2,50	0,99	4,34	3,27	1,62	3,01
KOTA PALU	4,21	3,65	4,76	4,47	3,88	4,31	5,00	4,15	4,11	4,39	3,19	4,24	4,20

Keterangan : Pilar 1 Institusi; Pilar 2 Infrastruktur; Pilar 3 Adopsi TIK; Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro; Pilar 5 Kesehatan; Pilar 6 Keterampilan; Pilar 7 Pasar Produk; Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja; Pilar 9 Sistem Keuangan; Pilar 10 Ukuran Pasar; Pilar 11 Dinamika Bisnis; Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 telah dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), apabila dilihat dari hasil nilai tersebut rata-rata nasional adalah **3,50** sementara nilai Sulawesi Tengah yakni **3,41**, selisih -0,09, sementara pada provinsi-provinsi yang ada di pulau Sulawesi, Sulawesi Tengah berada di posisi ke 4 (empat) dengan nilai tertinggi ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Pada komponen Ekosistem Inovasi yakni pilar 11 masih rendah, pada komponen Lingkungan Pendukung yakni pilar 4 juga masih rendah, kemudian komponen Sumber Daya Manusia pilar 6 juga masih rendah. Oleh karena itu diharapkan hasil ini menjadi perhatian bagi Provinsi Sulawesi Tengah walaupun telah mendapat penghargaan **Pengelolaan Indeks Daya Saing Terbaik Tahun 2025** dari **Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)**, diharapkan

penghargaan tersebut menjadi motivasi lagi dalam peningkatan Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 agar bisa naik secara signifikan dan melampaui nilai rata-rata nasional serta provinsi lainnya di pulau Sulawesi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator I, target kinerja Nilai **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** sudah sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan tahun 2025.

a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :

- Lonjakan Kapabilitas Inovasi (Pilar 12)

Faktor keberhasilan paling mencolok adalah lompatan skor Pilar 12 sebesar 0,82 poin. Keberhasilan ini dipicu oleh penyempurnaan metodologi belanja riset yang kini lebih inklusif dengan memasukkan komponen gaji dosen dan belanja riset dari NGO. Hal ini memberikan pengakuan yang lebih adil terhadap ekosistem riset di universitas-universitas Sulawesi Tengah yang sebelumnya tidak terekam secara optimal.

- Modernisasi Infrastruktur dan Utilitas (Pilar 2)

Pilar Infrastruktur mencatatkan kenaikan signifikan dari 2,52 menjadi 3,05 (+0,53). Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi dan penurunan angka susut energi listrik. Meskipun masih ada tantangan pada sektor utilitas air, perbaikan pada konektivitas transportasi dan energi memberikan fondasi kuat bagi produktivitas sektor pertambangan (nikel) dan industri pengolahan di daerah.

- Keunggulan Ukuran Pasar (Pilar 10)

Sulawesi Tengah mempertahankan kekuatannya pada Pilar Ukuran Pasar dengan skor 4,70, menjadikannya salah satu yang tertinggi secara nasional. Hilirisasi industri nikel mendorong pertumbuhan PDRB yang masif, sementara penguatan kapasitas domestik tercermin dari penurunan ketergantungan nilai impor terhadap volume ekonomi daerah.

b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- Penurunan sebesar 0,37 poin pada Pilar 11 merupakan kegagalan terbesar dalam transisi tahun ini. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: **1). Perubahan Metodologi NIB:** Penghitungan Nomor Induk Berusaha (NIB) kini didasarkan pada lokasi proyek secara spesifik, bukan lagi lokasi domisili kantor pusat. Hal ini menyebabkan koreksi skor bagi Sulawesi Tengah yang sebelumnya mungkin mendapatkan limpahan administratif dari pendaftaran perusahaan nasional. **2). Akses Layanan Perbankan:** Masih terbatasnya jumlah bank fungsional di wilayah pelosok tetap menjadi hambatan bagi dinamika operasional unit usaha baru.
- Volatilitas Makroekonomi dan Ruang Fiskal (Pilar 4)
Penurunan skor Pilar 4 dari 4,07 ke 3,71 mengindikasikan kegagalan dalam memperluas ruang fiskal daerah. Sulawesi Tengah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sementara kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan investasi infrastruktur publik secara mandiri.
- Koreksi Keterampilan Digital (Pilar 6)
Penurunan skor Pilar Keterampilan sebesar 0,25 poin bukan disebabkan oleh penurunan kualitas SDM secara fisik, melainkan karena transisi standar digital dari Indeks Literasi Digital (ILD) menuju Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Standar IMDI yang lebih ketat dalam mengukur pemberdayaan dan pekerjaan digital tingkat lanjut menyingkap bahwa masyarakat Sulawesi Tengah masih berada pada tingkat penggunaan internet dasar.

c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

- **Integrasi IMDI dalam Kurikulum Vokasi:** Menyelaraskan program pelatihan kerja di BLK dan SMK dengan standar IMDI untuk meningkatkan keterampilan digital produktif.
- **Optimasi Peran BRIDA:** Badan Riset dan Inovasi Daerah harus memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan Merek Dagang secara lebih proaktif guna mempertahankan lonjakan di Pilar 12.
- **Modernisasi SPAM:** Fokus pada perbaikan manajemen utilitas air melalui pengurangan tingkat kebocoran pipa (SIMSPAM) untuk mendongkrak Pilar 2 lebih lanjut.

- **Pemanfaatan Kalkulator IDSD:** OPD terkait harus menggunakan alat simulasi kebijakan dari BRIN untuk memproyeksikan target kinerja indikator secara terukur dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.

d. Dokumentasi

- Targetkan Peningkatan Skor IDSD Tahun 2025, Brida Sulteng Gelar FGD Bersama OPD Terkait di Ruang Inovasi Kantor BRIDA Prov. Sulteng



Dalam penilaian indeks daya saing daerah, terdapat 12 pilar yang wajib dipenuhi baik kementerian/Lembaga maupun OPD untuk meningkatkan IDSD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi. Ke-12 pilar tersebut diperlukan penyelarasan data, yang nantinya akan memengaruhi skor akhir dari penilaian indeks daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian perlunya kerja sama antara Brida Provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah serta instansi terkait untuk menyelaraskan data-data yang ada.

- Penerimaan Penghargaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta



Indikator II, target kinerja Nilai **Indeks Inovasi Daerah (IID)** sudah sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan tahun 2025

a. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan target indikator kinerja, yaitu :

1. Dokumen Indikator pemenuhan Inovasi terpenuhi (baik);
2. Adanya kolaborasi Multi pihak (Replikasi Inovasi);
3. Kelembagaan inovasi yang kuat dalam hal ini BRIDA selalu melakukan desk ke OPD terkait Inovasi.

b. Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:

1. Pada satuan inovasi daerah (SID) skor kematangan inovasi masih rendah karena belum terpenuhinya indikator replikasi inovasi, inovasi yang terkirim pada system IGA belum tercantum secara spesifik dalam DPA/RKA dan kualitas inovasi yang disajikan dalam bentuk video belum memenuhi 5 substansi;
2. Pada satuan pemerintah daerah (SPD) terdapat indikator yang belum terpenuhi yakni, menurunnya NIB dan belum ditetapkannya SID/RIPJPID.

c. Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Brida provinsi memfasilitasi MOU replikasiinovasi daerah dengan kab/kota (sigi,kota palu,donggala,poso,touna dan morut);
2. Telah menyampaikan kepada OPD untuk mencantumkan dalam RKA belanja makan minum/pembinaan inovasi;
3. Telah melakukan pembinaan kepada OPD agar pembuatan video untuk memenuhi 5 suptansi wajib (media sosial resmi);
4. Telah terbit surat Gubernur tentang kewajiban bagi pejabat eselon II dan eselon III untuk berinovasi.

e. Dokumentasi Bidang Teknologi dan Inovasi

- Tingkatkan Nilai Kematangan IID, Brida Sulteng Beri Pembekalan Kepada Balitbang Kab. Donggala di Ruangan Bidang Teknologi dan Inovasi Kantor BRIDA Prov. Sulteng



Di setiap organisasi perangkat daerah sebisa mungkin memasukan inovasi dalam meningkatkan kematangan indeks inovasi daerah yang ada di kabupaten/kota, untuk diikutkan dalam ajang penghargaan innovative government award (IGA) yang digagas oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Dan terdapat 21 indikator yang harus dipenuhi dalam inovasi yang diajukan, diantaranya seperti regulasi inovasi daerah, bimtek inovasi, keterlibatan aktor inovasi, pelaksanaan inovasi daerah, jejaring inovasi, sosialisasi inovasi daerah.

- Brida Sulteng Dampingi OPD Tingkatkan Indeks Inovasi Daerah di Ruang Inovasi Kantor BRIDA Prov. Sulteng



Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam inovasi yang diajukan, diantaranya seperti regulasi inovasi daerah, bimtek inovasi, keterlibatan aktor inovasi, pelaksanaan inovasi daerah, jejaring inovasi, sosialisasi inovasi daerah. IID sendiri terbagi menjadi 2 aspek yaitu aspek satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi, yang mana terdapat 8 variabel dan 36 indikator yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan skor IID dari tahun sebelumnya.

- Dorong Kematangan Nilai IID Kab. Donggala, Brida Sulteng Lakukan Pembinaan Pengelolaan Inovasi Daerah



Rendahnya kematangan inovasi daerah Kabupaten Donggala menjadi salah satu sebab pembinaan pengelolaan inovasi daerah ini dilakukan. Sebagaimana diketahui terdapat 4 kabupaten yang masuk kategori kurang inovatif, yaitu Kabupaten Donggala, Buol,

Banggai Kepulauan dan juga Kabupaten Poso. Maka itu dilakukan pendampingan dan pembinaan agar seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 bisa memperoleh kategori inovatif.

- BRIDA Sulteng Gelar Audiensi Bersama Seluruh OPD Untuk Tingkatkan Skor Kematangan Indeks Inovasi Daerah



Sebagai bentuk apresiasi Brida Sulteng akan memberikan penghargaan bagi para inovator yang telah melaporkan inovasinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brida ditahun-tahun sebelumnya. Tentunya dari kegiatan ini diharapkan seluruh OPD, khususnya perangkat daerah yang belum melaporkan inovasi daerah ditahun 2025 untuk bisa berkomitmen dan bekerja sama guna meningkatkan indeks inovasi daerah sebagaimana yang diharapkan.

- Kegiatan Pembinaan IID Kepada Perangkat Daerah Melalui Program “Kampung Berani Berinovasi” di Aula Nagaya Kantor BRIDA Prov. Sulteng



Dalam upaya memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah lakukan Pembinaan Penguatan Indeks Inovasi Daerah (IID). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola, melaporkan, serta mengembangkan inovasi yang berdaya guna baik dilingkup pemerintahan maupun bagi Masyarakat

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	(5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	3,43	3,41	99,42	368.748.850	367.800.761	99,74	-0,33
2	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	75	57,12	76,16	943.869.550	943.621.893	99,97	-23,81

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Daerah, capaian kinerja sebesar **99,42%** dengan realisasi anggaran **99,74%** menghasilkan tingkat efisiensi **-0,33**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif seimbang dengan capaian kinerja dan tergolong efisien karena selisihnya sangat kecil.
- Sasaran Meningkatkan Inovasi dan Hasil Riset Daerah, capaian kinerja hanya **76,16%** meskipun realisasi anggaran mencapai **99,97%**, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi **-23,81**. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang terserap belum sepenuhnya sebanding dengan hasil kinerja yang dicapai.

Berdasarkan hasil analisis, efisiensi penggunaan sumber daya pada dua tujuan/sasaran BRIDA menunjukkan kecenderungan positif dari sisi pengelolaan anggaran. Program **Meningkatnya Daya Saing Daerah** belum dapat dinilai efektivitas kinerjanya karena tidak tersedia target dan realisasi indikator, namun tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya keuangan telah berjalan optimal meskipun outcome kinerja belum dapat diukur secara jelas.

Sementara itu, program **Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah** memperlihatkan hasil yang lebih terukur dan tingkat efisiensi menunjukkan penggunaan sumber daya yang cukup efisien dalam mendukung pencapaian tujuan program. Secara keseluruhan, BRIDA menunjukkan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik, namun perlu penguatan pada penetapan indikator kinerja agar analisis efisiensi dapat menggambarkan hasil yang lebih komprehensif.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program penunjang sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri atas empat (4) kegiatan, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas delapan (8) kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.7

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68.5	Rp. 10.988.556.415	83.08	Rp. 9.128.837.074	83.08	Rp. 9.128.837.074
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	81	Rp. 225.547.000	99.96	Rp. 225.450.239	99.96	Rp. 225.450.239
			Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100%					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	97%	Rp. 8.609.580.723	78.77	Rp. 6.781.583.108	78.77	Rp. 6.781.583.108
			Persentase TLHP BPK dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	100%					
3	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%	Rp. 4.437.550	100	Rp. 4.437.550	100	Rp. 4.437.550
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	Rp. 68.750.000	99.68	Rp. 68.528.000	99.68	Rp. 68.528.000
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	60					
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	60	Rp. 655.586.179	99.92	Rp. 655.057.996	99.92	Rp. 655.057.996
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Pada Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	100%					
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	60	Rp. 420.533.200	96.83	Rp.407.214.600	96.83	Rp.407.214.600
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	60	Rp. 298.316.763	94.12	Rp. 280.785.922	94.12	Rp. 280.785.922
		Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	60					
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dipelihara	100%	Rp. 705.805.000	100	Rp.705.779.659	100	Rp.705.779.659
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	100%					

	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%	Rp. 1.600.966.650	99.13	Rp. 1.587.060.616	99.13	Rp. 1.587.060.616
		Meningkatnya Kualitas SDM IPTEK	Persentase Peningkatan Kualitas SDM IPTEK	100%					
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Riset dan Inovasi	100%					
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah	Persentase Penerapan Inovasi Daerah	100%					
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 368.748.850	99.74	Rp. 367.800.761	99.74	Rp. 367.800.761
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK	Persentase Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK	100%	Rp. 141.939.600	96.02	Rp. 136.294.162	96.02	Rp. 136.294.162
		Meningkatnya Infrastruktur Riset	Persentase Infrastruktur Riset yang berfungsi	100%					
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Meningkatnya Hasil Riset yang Termanfaatkan	Persentase Hasil Riset yang Termanfaatkan	100%	Rp. 146.408.650	95.17	Rp. 139.343.800	95.17	Rp. 139.343.800
		Meningkatnya Hasil Inovasi yang Termanfaatkan	Persentase Hasil Inovasi yang Termanfaatkan	100%					
		Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Terkelola	100%					
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya kualitas Penetapan Daftar Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Terdaftar	100%	Rp. 943.869.550	99.97	Rp. 943.621.893	99.97	Rp. 943.621.893

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa, dan Data dan Pengkajian Peraturan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.8
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	100%
2.	Tersusunnya Laporan Implementasi Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah	1 Lap	1 Lap	100%	100%
3.	Terlaksananya Penguatan dan Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Adanya dukungan Penuh dari OPD terkait dalam hal kelengkapan data yang termuat dalam Indeks Daya Saing Daerah;
2. Terlaksananya Koordinasi dan Dukungan Penuh dengan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Perangkat Daerah terkait di Provinsi/Kab/Kota untuk penguatan dalam mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Daerah;

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Hasil Indeks IDSD Penurunan sebesar 0,37 poin pada Pilar 11 merupakan kegagalan terbesar dalam transisi tahun ini.;
2. Terbatasnya untuk mengetahui penyebab rendahnya indeks pada pilar Kapabilitas Inovasi Daerah, Dimana sumber data sekunder yang dikur oleh BRIN untuk pilar tersebut didapatkan dari 3 Kementerian yaitu data sekunder di Kemendagri, Kemenristekdikti dan Kemendikbud;
3. Waktu Pelaksanaan Implementasi yang harus dilaksanakan setelah Pelaksanaan Seminar Akhir Riset;
4. Sebagian besar pelaksanaan Riset berakhir pada akhir tahun, sehingga untuk implementasi hasil Riset belum dapat dilaksanakan pada tahun yang sama;

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan kegiatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan bidang kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.9
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK	100%	100%	100%	100%
1.	Terlatihnya Kelompok Masyarakat Dalam Penerapan Riset dan Inovasi di kab/kota	15 Kelompok	15 Kelompok	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

- Terlatihnya Kelompok Masyarakat dalam penerapan riset dan inovasi ditunjang ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan tenaga ahli, adanya partisipasi Masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta dukungan oleh pemerintah setempat.

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

- Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan SDM Jabatan Fungsional Peneliti, SDM Analis Pemanfaatan IPTEK dan penyediaan dokumen rencana sarana dan prasarana pendukung laboratorium riset yang terstandar dan dokumen rencana Kawasan Sains Park karena serta masih kurangnya tenaga ahli.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan merupakan kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan Sosial dan Budaya, Kependudukan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.10
Output Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%
1.	Terdaftaranya Hak kekayaan intelektual (HKI)	2 HKI	2 HKI	100%	100%
2.	Terpenuhinya Publikasi dan Persyaratan Akreditasi Jurnal	1 Dok	1 Dok	100%	100%
3.	Termanfaatkannya Hasil Riset Daerah	2 Hasil	2 Hasil	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Adanya pendampingan pendaftaran, dukungan anggaran, serta peningkatan kesadaran peneliti/inovator terhadap perlindungan kekayaan intelektual.
2. Peningkatan kualitas artikel ilmiah, tata kelola jurnal yang baik, serta pemenuhan standar akreditasi nasional.
3. Sinergi antara peneliti dan OPD, dukungan regulasi, serta penerapan hasil riset dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Belum tersinkronnya program dan kegiatan antara provinsi/kabupaten/kota, terbatasnya pembiayaan dalam pelaksanaan program kegiatan, serta terbatasnya dunia usaha/industri dalam pemanfaatan riset dan inovasi.

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi merupakan kegiatan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan bidang Inovasi dan Teknologi urusan Pengembangan Teknologi dan Inovasi, Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, dan Diseminasi Kelitbangan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

Tabel 3.11
Output Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya kualitas Penetapan Daftar Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%
1.	Terlaksananya diseminasi hasil riset dan inovasi daerah melalui saluran komunikasi publik	3 media	3 media	100%	100%
2.	Terpenuhinya artikel hasil riset	2 artikel	2 artikel	100%	100%
3.	Terpublikasinya buku hasil riset	2 Buku	2 Buku	100%	100%
4.	Terpenuhinya komponen inovasi daerah yang diterapkan	21 komponen	21 komponen	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Pada satuan inovasi daerah (SID) skor kematangan inovasi masih rendah dikarena belum terpenuhinya indicator replikasi inovasi, inovasi yang terkirim pada system IGA belum tercantum secara spesifik dalam DPA/RKA dan kualitas inovasi yang disajikan dalam bentuk video belum memenuhi 5 substansi
2. Pada satuan pemerintah daerah (SPD) terdapat indicator yang belum terpenuhi yakni, menurunnya NIB dan belum ditetapkannya SID/RIPJPID.

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Brida provinsi memfasilitasi MOU replikasiinovasi daerah dengan kab/kota (sigi,kota palu,donggala,poso,touna dan morut);
2. Telah menyampaikan kepada OPD untuk mencantumkan dalam RKA belanja makan minum/pembinaan inovasi;
3. Telah melakukan pembinaan kepada OPD agar pembuatan video untuk memenuhi 5 suptansi wajib (media sosial resmi);
4. Telah terbit surat Gubernur tentang kewajiban bagi pejabat eselon II dan eselon III untuk berinovasi.

Tabel 3.12
Output Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	90,90 (AA)	100%	100%
1.	Tersusunnya dokumen bukti dukung dalam E-SAKIP Reviu (ESR) Kemenpan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
2.	Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%
3.	Tersusunnya dokumen manajemen resiko dan proses bisnis	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
4.	Tersusunnya dokumen realisasi anggaran dan kinerja TEPR dan Eavaluasi RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
5.	Tersusunnya laporan capaian IKU perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
6.	Tersusunnya laporan P3DN sesuai TKDN	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
7.	Tersedianya data sektoral perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Komitmen kuat dari Kepala perangkat daerah menjadi motor penggerak dan memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SAKIP;
2. Penerapan manajemen kinerja: SAKIP akan berhasil jika diterapkan sebagai bagian dari manajemen kinerja sehari-hari, bukan hanya sebagai laporan tahunan;
3. Budaya akuntabilitas: Adanya budaya di mana setiap aparatur sadar akan pentingnya akuntabilitas dan bertanggung jawab atas kinerjanya
4. Kesesuaian dokumen perencanaan strategis dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pemerintah daerah;
5. Indikator kinerja yang terukur jelas, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.
6. Kemudahan aplikasi yang digunakan sebagai bahan pelaporan P3DN
7. Komitmen pimpinan OPD dalam penyediaan dan pemutakhiran data secara berkala.

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Keterbatasan SDM yang kompeten, perangkat daerah sering kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki keahlian khusus dalam menyusun dokumen SAKIP;
2. Beberapa pegawai cenderung menolak perubahan dari sistem lama ke sistem akuntabilitas kinerja yang baru karena merasa tidak nyaman atau tidak terbiasa;
3. Kurangnya sinergi komunikasi dan koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan unit teknis di perangkat daerah dapat menghambat kelancaran pelaksanaan SAKIP.

Tabel 3.13
Output Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	97%	100%	100%	100%
1.	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
2.	Terverifikasinya dokumen pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%
3.	Tersdistribusinya pembayaran gaji, tunjangan dan TPP (tersusunnya dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	100%	100%	100%	100%
4.	Tersusunnya dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik
2. Memiliki SPI yang kuat dan berfungsi efektif dapat mencegah terulangnya temuan serupa, SPI yang andal akan memastikan bahwa sistem kerja dan prosedur berjalan sesuai aturan;
3. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang terperinci untuk setiap rekomendasi audit akan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mengetahui perannya
4. Adanya pedoman atau prosedur baku mengenai tata cara pelaksanaan tindak lanjut,

termasuk batas waktu penyelesaian, akan memastikan proses berjalan secara terstruktur;

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Pergantian pejabat yang bertanggung jawab atas suatu program atau kegiatan dapat menghambat proses tindak lanjut, terutama jika pejabat baru tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai temuan audit sebelumnya;
2. Keterbatasan sistem informasi, jika tidak ada sistem yang memadai untuk memantau status penyelesaian tindak lanjut, proses pemantauan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap ketidakjelasan.

Tabel 3.14
Output Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
1.	Tersusunnya dokumen rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Memiliki SPI yang kuat dan berfungsi efektif dapat mencegah terulangnya temuan serupa, SPI yang andal akan memastikan bahwa sistem kerja dan prosedur berjalan sesuai aturan
2. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang terperinci untuk setiap rekomendasi audit akan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mengetahui perannya
3. Adanya pedoman atau prosedur baku mengenai tata cara pelaksanaan tindak lanjut, termasuk batas waktu penyelesaian, akan memastikan proses berjalan secara terstruktur;

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Pergantian pejabat yang bertanggung jawab atas suatu program atau kegiatan dapat menghambat proses tindak lanjut, terutama jika pejabat baru tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai temuan audit sebelumnya;

2. Keterbatasan sistem informasi, jika tidak ada sistem yang memadai untuk memantau status penyelesaian tindak lanjut, proses pemantauan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap ketidakjelasan.

Tabel 3.15
Output Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
1.	Terbayarkannya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	27 unit	27 unit	100%	100%
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	27 unit	100%	100%
3.	Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya	50 unit	50 unit	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Perencanaan anggaran tepat, administrasi tertib, dan monitoring pembayaran rutin.
2. Jadwal perawatan berkala, kepatuhan pajak dan perizinan, serta pengawasan penggunaan kendaraan.
3. Inventarisasi aset yang baik, pemeliharaan rutin, dan dukungan anggaran yang memadai.

Tabel 3.16
Output Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	60	100%	100%
1.	Tersosialisasinya ASN tentang kebijakan/peraturan pemerintah yang berlaku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
2	Terbinanya dan terbimbanya ASN tentang kebijakan riset dan inovasi daerah	7 Orang	7 Orang	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini Adalah;

1. Adanya dukungan pimpinan dan partisipasi aktif ASN
2. Adanya komitmen ASN dalam mengikuti dan menerapkan hasil pembinaan.

Tabel 3.17
Output Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
A.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	60	65,10	100%	100%
1.	Termanfaatkannya sistem pengadaan secara elektronik (E-Tendering, E-Purchasing, E-Catalog dan sistem lainnya)	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah :

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah menggunakan metode E-Purchasing;
2. Pengumuman RUP sudah sesuai dengan prosedur dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pencatatan Paket Non Tender telah dilakukan dengan baik;

Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian ini adalah :

1. Tidak memiliki Paket Tender, sehingga untuk aspek kebutuhan e-Tendering belum terpenuhi.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah Rp. 12.170.819.865,63 yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp. 12.589.523.065,63 atau 85,12%. Anggaran tersebut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu :

a. Belanja Pegawai

Anggaran dalam Belanja Pegawai terdiri atas gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 7.633.540.723,63 terealisasi sebesar Rp. 5.817.116.129,00 atau 76,20%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari 2 Program dan 23 kegiatan sebesar Rp. 4.535.449.142,00 terealisasi sebesar Rp. 4.491.566.961,00 atau 99,03%.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 420.533.200,00 terealisasi sebesar Rp. 407.214.600,00 atau 96,83%.

Rendahnya realisasi belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan disebabkan karena porsi anggaran yang melebihi kebutuhan pembiayaan selama tahun 2025. Realisasi belanja tahun 2025 pada masing-masing program dan kegiatan dijabarkan pada tabel 3.18

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Belanja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp.	Rp.	%
1	2	7	8	9
	BELANJA OPERASI			
	- BELANJA PEGAWAI	8.432.600.723,63	6.604.658.378	78,32
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	799,060,000	787,542,249	99
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7.633.540.723,63	5.817.116.129	76,20
	- BELANJA BARANG DAN JASA	4,535,449,142	4,491,566,961	99,03
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,934,482,492	2,904,506,345	99
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225,547,000	225,450,239	99,96
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6,000,000	5,982,300	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp.	Rp	%
1	2	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	206,272,000	206,193,148	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,325,000	6,324,800	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,950,000	6,949,991	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	976,040,000	964,466,979	98.81
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	799,060,000	787,542,249	99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	176,980,000	176,924,730	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	4,437,550	4,437,550	100
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4,437,550	4,437,550	100
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,750,000	68,528,000	99.68
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39,150,000	39,083,000	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	29,600,000	29,445,000	99
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	655,586,179	655,057,995	99.92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,334,661	16,304,400	99.81
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,773,450	72,735,065	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29,006,168	28,836,710	99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156,486,900	156,227,550	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380,985,000	380,954,271	100
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,316,763	280,785,922	94.12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,207,500	2,207,500	100
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203,859,263	186,398,450	91
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	4,950,000	99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87,250,000	87,229,972	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705,805,000	705,779,659	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,255,000	22,255,000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	629,920,000	629,904,475	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,630,000	53,620,184	100
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420,533,200	407,214,600	96.83
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420,533,200	407,214,600	96.83
	PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,600,966,650	1,587,060,616	99
1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	368,748,850	367,800,761	99.74
	Fasilitasi, Pelaksanaan Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	368,748,850	367,800,761	99.74
2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	141,939,600	136,294,162	96.02
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	85,370,950	82,926,050	97
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	56,568,650	53,368,112	94
3	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	146,408,650	139,343,800	95.17
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	56,264,350	55,914,500	99

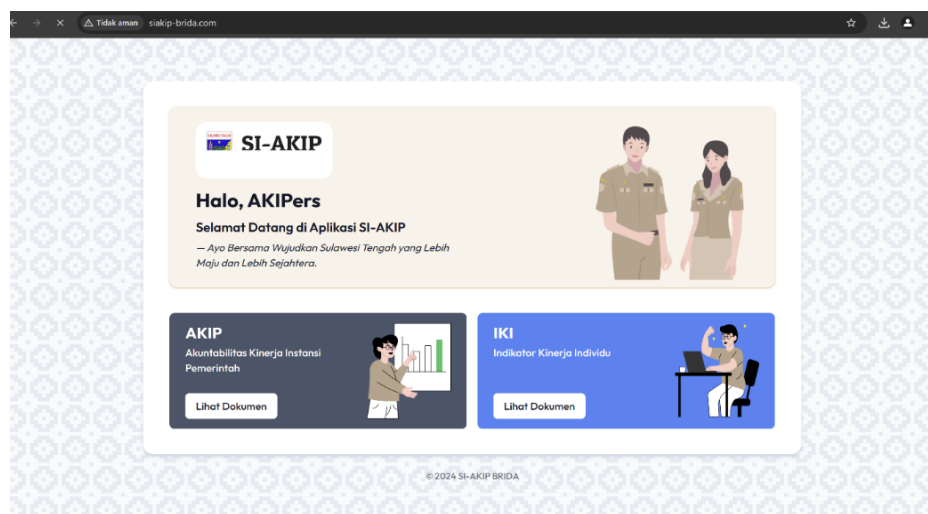
NO	PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp.	Rp	%
1	2	7	8	9
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	31,519,750	31,419,750	100
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	58,624,550	52,009,550	89
4	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	943,869,550	943,621,893	99.97
	Penelitian dan Pengembangan, Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	391,536,750	391,521,575	100
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	248,802,800	248,622,800	100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	303,530,000	303,477,518	100.00
	TOTAL BELANJA OPERASI	12.168,989,866	10,308,683,090	85
	BELANJA MODAL	420,533,200	407,214,600	96.83
	- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	420,533,200	407,214,600	96.83
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420,533,200	407,214,600	96.83
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420,533,200	407,214,600	96.83
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	420,533,200	407,214,600	96.83
	TOTAL BELANJA MODAL	420,533,200	407,214,600	96.83
	TOTAL BELANJA DAERAH	12.168,989,866	10,308,683,090	85
	TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA GAJI	4,535,449,142.40	2,675,142,366.40	58.98

Berdasarkan Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran untuk mencapai sasaran adalah **Baik**. Hal ini berarti keberhasilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2025 ini diperoleh melalui pengelolaan sumber daya anggaran dengan sangat baik pula mulai dari perencanaan anggaran yang matang dan tepat sasaran sehingga setiap rencana aksi dalam setiap kegiatan benar-benar dapat terukur dan mendukung pencapaian kegiatan maupun sasaran strategis.

3.3 Inovasi

Inovasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2025 ada 4 Aplikasi, diantaranya SI-AKIP, SIM RIDA, E-RISA, dan JURNAL BOMBA. Inovasi ini merupakan Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Sekretaris BRIDA Prov. Sulteng.

- SI-AKIP



- SIM-RIDA



- E-RISA



- JURNAL BOMBA



3.4 Penghargaan

BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh berbagai penghargaan sebagai wujud kinerja organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat AA (nilai 90,90) – Sangat Memuaskan menunjukkan bahwa BRIDA mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan Predikat BB (nilai 78,39) – Baik menegaskan keberhasilan BRIDA dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkinerja tinggi.

Selain itu, BRIDA meraih Peringkat I ASN berAKHLAK OPD se-Provinsi dengan nilai 91,70 – Sehat, yang mencerminkan kuatnya budaya kerja ASN yang berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Pada aspek administrasi, BRIDA juga memperoleh Penghargaan Pengelolaan Kearsipan dengan Predikat B – Baik, sebagai bukti pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai standar, dalam mendukung akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

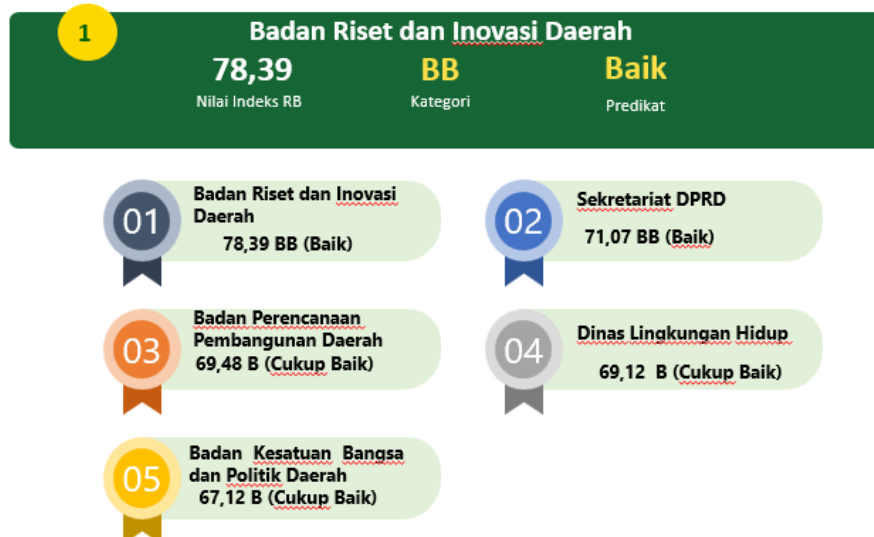


- Pengelolaan Kearsipan OPD se-Provinsi



- Indeks Reformasi Birokrasi

🏆 Peringat 5 Teratas Perangkat Daerah



- ASN berAKHLAK Peringkat I OPD se-Provinsi

**Nilai Hasil Survei Internal Indeks BerAKHLAK Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Badan Kepegawaian Daerah	72.44	Cukup Sehat
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	85.10	Sehat
3	Badan Penanggulangan Bencana	82.12	Sehat
4	Badan Pendapatan Daerah	42.52	Tidak Sehat
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	41.41	Tidak Sehat
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	39.13	Tidak Sehat
7	Badan Penghubung	60.03	Cukup Sehat
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65.89	Cukup Sehat
9	Badan Riset Inovasi Daerah	91.70	Sehat
10	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	40.43	Tidak Sehat
11	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	66.34	Cukup Sehat

Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir keseluruhan target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik.

BAB**IV****PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Dokumen LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini merupakan pencerminan atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas serta kontribusi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun terdapat beberapa *aspek* diluar kendali namun BRIDA tetap memegang peranan terhadap capaian kinerja yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sasaran strategis yang belum mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu bagi perbaikan kinerja di tahun 2026.

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepannya, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan beberapa strategi antara lain :

1. Melakukan identifikasi area atau sektor yang perlu ditingkatkan, dan menerapkan intervensi strategis untuk mendorong keluaran/hasil yang maksimal dengan efisiensi yang lebih tinggi;
2. Lebih giat memberikan Reward dan Punishment kepada ASN terkait pencapaian kinerja agar menjadi pemicu peningkatan capaian kinerja kedepan;
3. Melakukan evaluasi capaian kinerja per triwulannya sehingga progress dapat dilihat pada setiap indikator yang ingin dicapai;
4. Perlunya penambahan anggaran kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam hal pelaksanaan Riset, Inovasi, Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi, Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah serta Peningkatan SDM Peneliti dan Analis Pemanfaatan IPTEK;

5. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui penetapan data populasi sasaran yang valid, intervensi program dan kegiatan yang tepat, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. Cristina Shandra Tobondo, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Pihak Pertama,
Pjt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

HASIM R, S.Kom., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760708 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,43
2.	Meningkatnya Inovasi dan Hasil Riset Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60

PROGRAM

ANGGARAN

KET

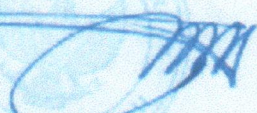
Badan Riset dan Inovasi Daerah

- | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. | 11.243.954.462,25 | APBD |
| 2 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. | 715.218.850,00 | APBD |

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA
Ptl. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID


HASIM R. S. Kom. M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTIN MARIA, SE., MM
**Jabatan : SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
**Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025



Pihak Pertama,


AGUSTIN MARIA, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68,50
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	97%
4.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase TLHP BPK dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%
6.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	60
8.	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	60
9.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Pada Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	100%
10.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	60
11.	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah	60
12.	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	60

13.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dipelihara	100%
-----	---	---	------

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.569.853.215	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 225.547.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 8.609.580.723	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Rp. 4.437.550	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp. 68.750.000	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 655.586.179	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 1.830.000	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 298.316.763	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 705.805.000	APBD

Palu, 10 November 2025

Sekretaris,



Pt. Kepala Badan

HASIM R. S. Kom., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760708 200112 1 004

AGUSTIN MARIA, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19770823 200903 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MURFIQIEN LATJUBA, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN MARIA, SE., MM
**Jabatan : SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,

AGUSTIN MARIA, SE., MM

Pihak Pertama,

ANDI MURFIQIEN LATJUBA, S.STP., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Didistribusi	1 Paket
2.	Tersosialisasinya ASN tentang Kebijakan/Peraturan Pemerintah yang Berlaku	Jumlah Kebijakan/Peraturan Pemerintah yang Disosialisasikan	1 Dok
3.	Terbinanya dan Terbimbanya ASN tentang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah ASN yang Dibina	7 Orang
4.	Tersusunnya Dokumen ANJAB/ABK	Jumlah Dokumen ANJAB/ABK	1 Dok
5.	Terupdatenya Data Kualifikasi,Kompetensi,Kinerja dan disiplin ASN	Jumlah Data Kualifikasi,Kompetensi,Kinerja dan disiplin ASN	1 Dok
6.	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan (SP,MP dan Laporan SKM)	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun	1 Paket
7.	Terukurnya SKM pada Layanan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan yang Diukur dengan SKM	1 Paket
8.	Tersedianya Komponen Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
9.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
10.	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalansi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor	1 Paket
11.	Terbayarkannya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Persentase Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah yang Dibayarkan	100%
12.	Terkompilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang Terkompilasi	1 Dok
13.	Tersusunnya Produk Hukum (Pergub,PERDA,dll) Perangkat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	1 Paket
14.	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor	Persentase Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor yang Ditindak Lanjuti	100%

15.	Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Road Map Penerapan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Road Map Penerapan SPBE Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dok
16.	Terkelolanya Sistem/Website Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Terpenuhi dalam Konten Website	50 Konten
17.	Terkelolanya Arsip Statis Perangkat Daerah	Persentase Arsip Statis yang Dikelola	100%
18.	Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah	Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang Dikelola	100%
19.	Terbayarkannya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terbayarkan	27 Unit
20.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit
21.	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin yang Dipelihara	50 Unit

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Rp. 0,00	APBD
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 39.150.000	APBD
3. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 29.600.000	APBD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor	Rp. 16.334.661	APBD
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 72.773.450	APBD
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 29.006.168	APBD
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 156.486.900	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 380.985.000	APBD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.207.500	APBD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 203.859.263	APBD

11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.000	APBD
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 87.250.000	APBD
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 22.255.000	APBD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 629.920.000	APBD
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 53.630.000	APBD

Palu, 10 November 2025

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,



AGUSTIN MARIA., SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770823 200903 2 002



ANDI MURFIOEN LATJUBA, S.STP., M.A.P
Penata
NIP.19921115 201406 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HETTY, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN MARIA, SE., MM
**Jabatan : SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerjaPa dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,

AGUSTIN MARIA, SE., MM

Pihak Pertama,

HETTY, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	1 Lap
2.	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang Diverifikasi dan ditindak Lanjuti Menjadi SPM	100%
3.	Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP (Tersusunnya Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN)	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang ditindak Lanjuti menjadi SPM	100%
4.	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Tersusun	100%
5.	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok
6.	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Tendering, E-Purchasing, E-Catalog dan Sistem lainnya)	Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	1Lap

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.633.540.723	APBD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 799.060.000	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 176.980.000	APBD
4. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD	Rp. 4.437.550	APBD
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 1.830.000	APBD

Palu, 10 November 2025

Sekretaris,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,


AGUSTIN MARIA., SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770823 200903 2 002


HETTY, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19760816 200112 2 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANS OCTAVIANUS, S.Hut

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTIN MARIA, SE., MM

**Jabatan : SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, ~~10 November~~ 2025

Pihak Kedua,

AGUSTIN MARIA, SE., MM

Pihak Pertama,

FRANS OCTAVIANUS, S.Hut

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Bukti Dukung Dalam E-SAKIP Reviu (ESR) Kemenpan	Jumlah Dokumen Pendukung E-SAKIP Reviu Kemenpan yang Tersusun	1 Dok
2.	Tersusunnya Dokumen Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA,DPA,RKAP,DPPA, RENJA dan RENJA Perubahan yang Tersusun	6 Dok
3.	Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Proses Bisnis	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Proses Bisnis yang Tersusun	2 Dok
4.	Tersusunnya Dokumen Realisasi Anggaran dan Kinerja TEPR dan Evaluasi RKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran dan Kinerja TEPR dan Evaluasi RKPD	2 Dok
5.	Tersusunnya Laporan Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian IKU Perangkat Daerah	1 Lap
6.	Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN	Jumlah Laporan P3DN Sesuai TKDN yang Disusun	1 Lap
7.	Tersedianya Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	1 Lap

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp. 6.000.000	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Rp. 206.272.000	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.325.000	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 6.950.000	APBD

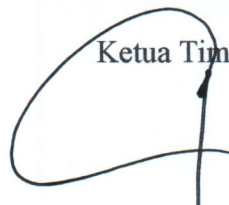
Palu, 10 November 2025

Sekretaris,



AGUSTIN MARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770823 200903 2 002

Ketua Tim,



FRANS OCTAVIANUS, S.Hut
Perencana Ahli Muda
NIP. 1978030 200604 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HASIM R, S.Kom., M.Si

Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,

ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Presentase Kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	100%
1.	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Yang ditindaklanjuti	Presentase Kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.600.966.650	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 368.748.850	APBD

Palu, 10 November 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S. Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

ROHANI I DATUMUSU S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710107 199203 2 007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AYUB MINGGU SURA
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si
**Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET
DAERAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,

Drs. AYUB MINGGU SURA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi, serta Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	1 Dok
2.	Tersusunnya Laporan Implementasi Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Implementasi Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah	1 Lap

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.	Rp. 368.748.850	APBD

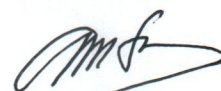
Palu, 10 November 2025

Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua Tim,



ROHANI I DATUMUSU S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710107 199203 2 007



Drs. AYUB MINGGU SURA
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19680922 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMMI KALSUM, S.Pi
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si
**Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET
DAERAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ROHANI I DATUMUSU, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,

UMMI KALSUM, S.Pi

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penguatan dan Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah	1 Dok

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Rp. 368.748.850

APBD

Palu, 10 November 2025

Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah ,

Ketua Tim,



ROHANI I DATUMUSU S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710107 199203 2 007



UMMI KALSUM, S.Pi
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19691013 199703 2 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
**Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,



HASIM R, S.Kom., M.Si

Pihak Pertama,

M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	100%
1.	Meningkatnya Hasil Riset yang Termanfaatkan	Persentase Hasil Riset yang Termanfaatkan	100%
2.	Meningkatnya Hasil Inovasi yang Termanfaatkan	Persentase Hasil Inovasi yang Termanfaatkan	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Terkelola	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.600.966.650	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 146.408.650	APBD

Palu, 10 November 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S. Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

Kepala Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi., M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19741022 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGKY WOWILING., S.H, M.M
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

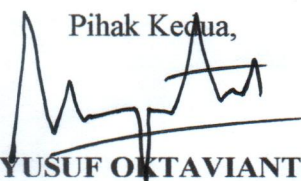
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

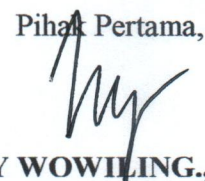
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 November 2025

Pihak Kedua,


M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc

Pihak Pertama,


HENGKY WOWILING., S.H, M.M

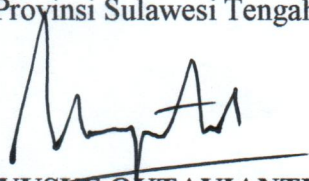
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terdaftarnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Terdaftar	2 HKI
2.	Terpenuhinya Publikasi dan Persyaratan Akreditasi Jurnal	Jumlah Dokumen Publikasi dan Persyaratan Akreditasi Jurnal yang Terpenuhi	1 Dok

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	Rp. 56.264.350	APBD
2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Rp. 31.519.750	APBD
3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp. 58.624.550	APBD

Palu, 10 November 2025

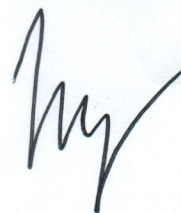
Kepala Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi., M.Sc

Pembina Tingkat I
NIP. 19741022 200112 1 003

Ketua Tim,



HENGKY WOWILING, SH., MM
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP.19720303 199203 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIL R. HASANI., S.Sos, M.Si
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

M. EDWARD YUSUF OKTAVIANTHO, S.Pi.,M.Sc

Palu, 10 November 2025
Pihak Pertama,

ASRIL R. HASANI., S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

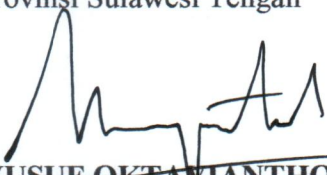
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Termanfaatkannya Hasil Riset Daerah	Jumlah Hasil Riset daerah yang Termanfaatkan	2 Hasil

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	Rp. 56.264.350	APBD
2. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Rp. 31.519.750	APBD
3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp. 58.624.550	APBD

Palu, 10 November 2025

Kepala Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua Tim,


M. EDWARD YUSUE OKTAVIANTHO, S.Pi., M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19741022 200112 1 003


ASRIL R HASANI, S.S.os., M.Si
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP.19710101 199401 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI OKTAVIA, SH., M.Si
Jabatan : Plh. KEPALA BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR RISET DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,
Nani P
NANI OKTAVIA, SH., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas SDM IPTEK	Persentase Peningkatan Kualitas SDM IPTEK	100%
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Riset dan Inovasi	100%
1.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK	Persentase Pengembangan Kompetensi, Profesi, dan Pengelolaan SDM IPTEK	100%
2.	Meningkatnya Infrastruktur Riset	Persentase Infrastruktur Riset yang berfungsi	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.600.966.650	APBD
KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 141.939.600	APBD

Palu, 10 November 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S. Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

Plh. Kepala Bidang SDM dan infrastruktur Riset Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Nani p

NANI OKTAVIA, SH., M.Si
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19781013 200112 2 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI OKTAVIA, SH., M.Si
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HASIM R, S.KOM., M.Si

Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,

NANI OKTAVIA, SH., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlatihnya Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Riset dan Inovasi di Kab/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Riset dan Inovasi di Kab/Kota yang Terlatih	15 Kelompok

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan pangan	Rp. 85.370.950	APBD
2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp. 56.568.650	APBD

Palu, 10 November 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S. Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

Ketua Tim,

NANI OKTAVIA, SH., M.Si
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19781013 200112 2 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASIM R, S. Kom, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S.KOM., M.Si
**Jabatan : Plt. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
HASIM R, S.Kom., M.Si

Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,

HASIM R, S. Kom, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah	Presentase Penerapan Inovasi Daerah	100 %
	Meningkatnya kualitas Penetapan Daftar Inovasi Daerah	Presentase Inovasi Daerah yang Terdaftar	100 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.600.966.650	APBD

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 943.869.550	APBD

Palu, 10 November 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


HASIM R. S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARFAR MADINA BOUTI, S.Pd., M.Si
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S. Kom, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HASIM R, S. Kom, M.Si

Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,

FARFAR MADINA BOUTI, S.Pd., M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah melalui Saluran Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah	3 Media
2.	Terpenuhinya Artikel Hasil Riset	Jumlah Artikel Hasil Riset yang Terpenuhi	2 Artikel
3.	Terpublikasinya Buku Hasil Riset	Jumlah Buku Hasil Riset yang Terpublikasi	2 Buku

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp. 391.536.750	APBD
2. Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan penerapan Teknologi	Rp. 248.802.800	APBD
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 303.530.000	APBD

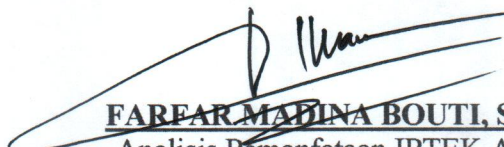
Palu, 10 November 2025

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi
Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19760708 200112 1 004

Ketua Tim,



FAREAR MADINA BOUTI, S.Pd., M.Si
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19690626 199304 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD AUMUSAL., S.Pt., MMA
Jabatan : ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASIM R, S. Kom, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HASIM R, S. Kom, M.Si

Palu, 10 November 2025

Pihak Pertama,

MOHAMAD AUMUSAL., S.Pt., MMA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Komponen Inovasi Daerah yang Diterapkan	Jumlah Komponen Inovasi Daerah yang Diterapkan	21 Komponen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp. 391.536.750	APBD
2. Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan penerapan Teknologi	Rp. 248.802.800	APBD
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 303.530.000	APBD

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



HASIM R. S.Kom., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760708 200112 1 004

Palu, 10 November 2025

Ketua Tim,

MOHAMAD AUMUSAL, S.Pt., MMA
Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda
NIP. 19681220 199903 1 003